



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 682 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Nomor 412/818/Diskopumker-Set/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Daftar Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Nomor 412/818/Diskopumker-Set/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Daftar Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Oktober 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 682 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 83  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN  
TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. MUHAMMAD RUSDI NIP.196308101986041001	PENGGUNA ANGGARAN
2	SUNDIANI, S.T. NIP.19740701 200701 2 021	BENDAHARA PENERIMAAN
3	TRİYULINA MADIYANTI, S.E. NIP.19850722 200903 2 013	BENDAHARA PENGELUARAN
4	ETTY YULIANA, S.E. NIP.19840728 201001 2 014	VERIFIKATOR

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH